

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN SAMPAH DI KABUPATEN BULUKUMBA PROVINSI SULAWESI SELATAN

Andi Amalia Tiara Putri

NPP. 30.1169

Asdaf Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan,

Program Studi: Studi Kebijakan Publik

E-mail: amaliatiara2001@gmail.com

Dosen Pembimbing: Mutia Rahmah, S.IP, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *The increase in the amount of waste generation with an average of 62,598.42 tonnes/year has made Bulukumba Regency from 2019 to 2021 never be separated from the top 3 (three) lists of regencies/cities that produce the largest waste in South Sulawesi. Apart from that, Bulukumba Regency only has two waste bank units and one TPS3R unit, coupled with the waste management in both the waste bank and TPS3R which is still not optimal. This then led researchers to find out what the supporting and inhibiting factors were, as well as the efforts made to optimize the implementation of waste management policies in Bulukumba Regency.* **Purpose:** *The purpose of this study is to describe the supporting, inhibiting factors, as well as the efforts made to optimize the implementation of waste management policies in Bulukumba Regency.* **Methods:** *This study used a qualitative method with an inductive approach with data collection techniques using observation, interviews, and documentation..* **Result:** *The results of this study indicate that in the process of handling waste in Bulukumba Regency there are inhibiting factors in the form of difficulties in recruiting competent human resources in handling waste. waste management, the lack of human resource development is characterized by the inadequate implementation of training, the not yet optimal infrastructure in waste handling, and the insufficiency of the implementing budget in supporting the successful process of implementing waste handling policies. There are also supporting factors that support the implementation of waste management policies such as the formation of an organization in the form of a Technical Implementation Unit (UPT) with clear tasks in assisting the waste handling process, the existence of clear and appropriate SOPs as guidelines for waste handling, as well as the availability and determination of the use of appropriate technology. in facilitating the waste handling process. Efforts have been made to optimize the implementation of waste handling policies in Bulukumba Regency by providing regular education and training to the community and cleaning staff groups at the TPA, maximizing the budget for operational costs in the waste handling process, and improving the maintenance of waste handling facilities and*

infrastructure. **Conclusion:** The conclusion of this study is that the implementation of waste management policies in Bulukumba Regency has not run optimally, this is indicated by the number of inhibiting factors that are more numerous than the supporting factors. Even so, from the government side, the Environmental and Forestry Service of Bulukumba Regency, as well as from community groups, in this case the cleaners and workers at the TPA, have tried to optimize the implementation of waste management policies in Bulukumba Regency. **Keywords:** Public Policy, Policy Implementation, Waste Management.

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Peningkatan jumlah timbulan sampah dengan rata-rata 62.598,42 ton/thn menjadikan Kabupaten Bulukumba sejak tahun 2019 sampai 2021 tidak pernah lepas dari 3 (tiga) besar daftar kabupaten/kota penghasil sampah terbesar di Sulawesi Selatan. Selain itu, Kabupaten Bulukumba hanya memiliki dua unit bank sampah dan satu unit TPS3R, ditambah dengan pengelolaan sampah baik di bank sampah maupun TPS3R ini masih belum maksimal. Hal ini yang kemudian mengantarkan peneliti untuk mengetahui apa faktor pendukung dan penghambat, serta upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan implementasi kebijakan penanganan sampah di Kabupaten Bulukumba. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan faktor pendukung, penghambat, serta upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan implementasi kebijakan penanganan sampah di Kabupaten Bulukumba. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan induktif dengan teknik pengumpulan data yang menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses penanganan sampah di Kabupaten Bulukumba ada faktor penghambat berupa kesulitan merekrut sumber daya manusia yang berkompeten dalam penanganan sampah hal ini disebabkan karena masih belum kondusifnya perspektif masyarakat terhadap pekerjaan yang bersentuhan langsung dengan sampah sebagai bahan buangan seperti petugas kebersihan dan pengelola sampah, minimnya pengembangan sumber daya manusia ditandai dengan kurang memadainya pelaksanaan pelatihan, belum maksimalnya sarana prasarana dalam penanganan sampah, serta tidak tercukupinya anggaran pelaksana dalam menunjang keberhasilan proses implementasi kebijakan penanganan sampah. Terdapat juga faktor pendukung yang mendukung implementasi kebijakan penanganan sampah seperti adanya pembentukan organisasi berupa Unit Pelaksana Teknis (UPT) dengan tugas yang jelas dalam membantu proses penanganan sampah, adanya SOP yang jelas dan sesuai sebagai pedoman penanganan sampah, serta ketersediaan dan ketetapan penggunaan teknologi yang tepat dalam memudahkan proses penanganan sampah. Upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan implementasi kebijakan penanganan sampah di Kabupaten Bulukumba dilakukan dengan memberikan edukasi dan pelatihan secara berkala kepada masyarakat dan kelompok petugas kebersihan di TPA, memaksimalkan anggaran biaya operasional dalam proses penanganan sampah, serta meningkatkan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah. **Kesimpulan:** Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa implementasi kebijakan penanganan sampah di Kabupaten Bulukumba belum berjalan secara optimal, hal ini ditandai dengan faktor penghambat yang lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan faktor pendukungnya. Meskipun begitu dari pihak pemerintah, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bulukumba, serta dari kelompok masyarakat

dalam hal ini petugas kebersihan dan pekerja di TPA telah berupaya untuk mengoptimalkan implementasi kebijakan penanganan sampah di Kabupaten Bulukumba. **Kata kunci: Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan, Penanganan Sampah.**

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu permasalahan yang dihadapi Indonesia sampai saat ini adalah masalah sampah. Sampah adalah barang yang dianggap sudah tidak terpakai dan dibuang oleh pemilik atau pengguna sebelumnya, tetapi bagi sebagian orang masih bisa dipakai jika dikelola dengan prosedur yang benar (Nugroho, 2013). Masalah sampah menjadi kompleks karena menimbulkan masalah baru dari berbagai sektor kehidupan, dari masalah pencemaran lingkungan, sektor kesehatan masyarakat, sosial budaya, sampai dengan perekonomian.

Permasalahan sampah disebabkan oleh banyak faktor diantaranya peningkatan jumlah penduduk, rendahnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya, dan kurangnya sarana prasarana yang digunakan dalam penanganan sampah. Peningkatan jumlah timbulan sampah dengan rata-rata 62.598,42 ton/thn menjadikan Kabupaten Bulukumba sejak tahun 2019 sampai 2021 tidak pernah lepas dari 3 (tiga) besar daftar kabupaten/kota penghasil sampah terbesar di Sulawesi Selatan.

Jumlah timbulan sampah yang terus meningkat di tiap tahunnya membuktikan bahwa masyarakat masih kurang kesadaran dalam hal membuang sampah pada tempatnya. Permasalahan sampah ini kemudian membuat pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba memutuskan untuk menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah. Peraturan ini ditujukan untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, memanfaatkan sampah menjadi sumber daya yang bernilai ekonomis, serta mengurangi timbulan sampah. Penanganan sampah dilakukan dengan ragam upaya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, mulai dari pengadaan sarana dan prasarana sampai dengan penanganan bank sampah dan TPS3R.

Kabupaten Bulukumba hanya memiliki dua unit bank sampah yang artinya sarana dan prasarana dalam penanganan sampah masih kurang. Bank sampah tersebut di tahun 2019-2022 mencatat sampah yang masuk sebanyak 67.296 kg/thn sementara yang terkelola hanya 64.716 kg/thn, hal ini menunjukkan bahwa masih ada 2.580 kg/thn sampah yang tidak terkelola dengan baik di kedua bank sampah ini dan berakhir di TPA. Untuk TPS3R sendiri Kabupaten Bulukumba hanya memiliki 1 (satu) unit TPS3R yang menunjukkan masih kurangnya sarana dan prasarana penanganan sampah. Berdasarkan tabel 1.5, jumlah sampah yang masuk di TPS3R Puri Asri dari 2019 hingga 2022 sebanyak 593.500 kg, sementara sampah yang terkelola hanya 588.750 kg hal ini menunjukkan masih ada 4.750 kg sampah yang belum terkelola dengan baik dan berakhir di TPA.

Berdasarkan data-data yang ada seperti peningkatan jumlah timbulan sampah serta pengelolaan sampah yang belum maksimal dari bank sampah dan TPS3R di tiap tahunnya, peneliti memilih tema dan judul mengenai “Implementasi Kebijakan Penanganan Sampah Di Kabupaten Bulukumba

Provinsi Sulawesi Selatan”.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Terdapat kendala atau faktor penghambat yang terjadi di lapangan selama proses implementasi kebijakan penanganan sampah di Kabupaten Bulukumba. Mulai dari masalah sumber daya manusia, sarana prasarana, sampai ke masalah anggaran yang berimbas terhadap tingkat optimalisasi penanganan sampah di Kabupaten Bulukumba.

1.3 Penelitian Terdahulu

Berikut adalah penelitian terdahulu yang menjadi perbandingan penulis dalam melakukan penelitian. Pertama, terdapat penelitian oleh Tri Yudianto, Prabang Setyono, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani (2021) dengan judul “Implementasi Kebijakan dan Strategi dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Blora”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran implementasi kebijakan pengelolaan sampah dan mendeskripsikan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten Blora. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan hasilnya berupa Implementasi pengelolaan sampah di Kabupaten Blora dapat berjalan dengan baik. Tingkat Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pengelolaan sampah berdasarkan Indeks kepuasan mencapai angka 86,858% dengan grade B atau memuaskan.

Kedua, penelitian oleh Athaya Dhiya Zafira, Enri Damanhuri (2019) dengan judul “Analisa Strategi Penerapan TPS3R Dalam Upaya Minimasi Ke TPA (Studi Kasus : Program TPS3R Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil evaluasi terhadap TPS 3R di wilayah Kabupaten Bandung. Penelitian ini menggunakan metode SWOT dengan hasilnya berupa hasil survey TPS 3R di Kabupaten Bandung terdapat 5,88% TPS 3R dengan status keberfungsian sangat baik, 41,18% baik, 5,88% kurang baik, dan 47,06% buruk.

Ketiga, penelitian oleh M. Auva Ahdi (2022) dengan judul “Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Benda Kota Tangerang”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat dan bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kelurahan Benda Kota Tangerang. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kelurahan Benda Kota Tangerang termasuk tinggi dengan rata-rata skor dari nilai keseluruhan responden sebesar 70,49%.

Keempat, penelitian oleh Sri Devi Al Riqi (2019) dengan judul “Perilaku Masyarakat Dalam Mengelola Sampah Rumah Tangga Di Desa Kemlagi Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perilaku masyarakat Kemlagi dalam mengelola sampah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku masyarakat Kemlagi dalam mengelola sampah didominasi pembakaran sampah di rumah masing-masing.

Kelima, penelitian oleh Siti Zahrotun Nisa, Dedy Riyadin Saputro (2021) dengan judul “Pemanfaatan Bank Sampah Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Masyarakat Di Kelurahan Kebonmanis Cilacap”. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau dan mendeskripsikan tentang penanganan dan pengelolaan sampah melalui bank sampah di Kelurahan Kebonmanis Kabupaten

Cilacap. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan hasil Adanya bank sampah di Kelurahan Kebonmanis Kabupaten Cilacap terbukti dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar.

Penelitian terdahulu menjadi acuan ketertarikan penulis untuk membahas topik penulis di atas. Dari penelitian sebelumnya, penulis tidak menemukan judul penelitian yang sama seperti judul penelitian penulis.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan lebih terfokus untuk mengetahui apa faktor pendukung, faktor penghambat, serta upaya untuk mengoptimalkan implementasi kebijakan penanganan sampah di Kabupaten Bulukumba.

1.5 Tujuan

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan penanganan sampah di Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan. Serta merumuskan upaya mengoptimalkan implementasi kebijakan penanganan sampah di Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan.

II. METODE

Metode penelitian terbagi ke dalam dua jenis, yakni metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kualitatif. Dalam hal ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian dengan metode kualitatif. Menurut W.Creswell (2018:32) penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimulai dengan asumsi dan penggunaan kerangka teoretis, dimana dalam mempelajari masalahnya peneliti menggunakan pendekatan kualitatif untuk penyelidikan dan pengumpulan data. Peneliti menggunakan metode deskriptif dalam melakukan penelitian terkait penanganan sampah di Kabupaten Bulukumba. Metode ini digunakan untuk menyajikan hasil penelitian dalam bentuk deskripsi, gambaran, atau tulisan secara sistematis sesuai dengan fakta di lapangan terkait objek atau peristiwa yang diteliti.

Kemudian, penulis melakukan pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, dokumentasi, dan observasi. Menurut Menurut W.Creswell (2018:76) bahwa teknik pengumpulan data pada penelitian kualitatif dikumpulkan dalam bentuk wawancara, observasi, dan dokumen, daripada mengandalkan satu sumber data. Pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik *purposive* dan *snowball sampling* sebanyak delapan informan yang sudah ditetapkan sesuai dengan pedoman wawancara.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dokumen-dokumen di lapangan seperti jurnal, foto, dan laporan yang digunakan untuk mempermudah penulisan agar lebih akurat. Selanjutnya, pada penelitian ini penulis menggunakan teknik observasi non partisipasi, dimana penulis melakukan pengamatan di lapangan terkait implementasi kebijakan penanganan sampah di Kabupaten Bulukumba. Adapun organisasi perangkat daerah lokasi penelitian ini adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kebijakan Publik

Menurut Wasistiono (2013:14) kebijakan publik adalah berbagai bentuk ketetapan yang disusun oleh lembaga yang memiliki kewenangan dan kekuasaan, dimana hasil yang disusun berdampak langsung maupun tidak langsung dalam bidang ekonomi, sosial budaya dan berbagai bidang kehidupan masyarakat. Artinya kebijakan publik hadir dengan tujuan mengatur kehidupan masyarakat demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Dye (2017:1) dalam bukunya berjudul *Understanding Public Policy*, “Public Policy is whatever the government choose to do or not to do” (kebijakan publik adalah apa pun pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu). Maksudnya pemerintah selalu punya pertimbangan dalam memutuskan sesuatu yang dilakukan demi kesejahteraan masyarakatnya.

Berdasarkan pendapat beberapa ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik dibuat untuk mengatur kehidupan masyarakat dan memecahkan ragam permasalahan yang ada.

3.2 Implementasi Kebijakan

Menurut Dye (2017:46) dalam bukunya berjudul *Understanding Public Policy* bahwa “Implementation involves all of the activities designed to carry out the policies enacted by the legislative branch”. Maksudnya bahwa dalam proses implementasi melibatkan semua kegiatan yang dirancang untuk melaksanakan kebijakan sebagaimana yang ditetapkan oleh lembaga legislatif”.

Berikut adalah dimensi yang berperan dalam suatu implementasi kebijakan menurut Dye (2017):

1. Organisasi Pelaksana

Dalam organisasi pelaksana terdapat 2 (dua) atribut pelaksanaan, yaitu pembentukan organisasi baru dan penambahan tugas organisasi eksisting. Implementasi kebijakan penanganan sampah di Kabupaten Bulukumba dinaungi oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bulukumba. Pembentukan organisasi baru yang disertai dengan tugas yang jelas akan mempermudah proses tercapainya tujuan implementasi kebijakan. Penelitian ini akan menganalisis ada tidaknya organisasi baru yang dibentuk untuk membantu proses implementasi kebijakan, serta bagaimana organisasi baru ini bekerja dengan penambahan tugas yang jelas sebagai pedoman dalam bekerja.

2. Anggaran Pelaksanaan

Atribut dalam dimensi anggaran pelaksanaan meliputi pendapatan dan belanja. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana pengaruh anggaran apakah mendukung atau menghambat proses implementasi kebijakan penanganan sampah di Kabupaten Bulukumba. Berkaitan dengan belanja anggaran pada proses implementasi kebijakan penanganan sampah di Kabupaten Bulukumba meliputi biaya upah pekerja, belanja operasional sarana dan prasarana yang digunakan dalam penanganan sampah, belanja bahan bakar kendaraan pengangkut sampah, dan belanja lainnya yang berkaitan dengan proses implementasi kebijakan.

3. Peraturan Pelaksanaan

Atribut dalam peraturan pelaksanaan ada 3 (tiga), yakni pembuatan SOP, diskresi, dan pemberian sanksi. Penelitian terkait implementasi kebijakan penanganan sampah di Kabupaten Bulukumba ini dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah. Peraturan pelaksanaan mengambil peran yang cukup besar dalam keberhasilan sebuah implementasi kebijakan. Dengan adanya peraturan, proses implementasi akan lebih terarah dan jelas sehingga lebih mudah mencapai tujuan kebijakan. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana peraturan pelaksanaan menjadi faktor pendukung atau penghambat dalam mencapai keberhasilan penanganan sampah di Kabupaten Bulukumba.

4. Sumber Daya Manusia

Atribut dalam dimensi sumber daya manusia meliputi rekrutmen, pengembangan, dan pemberhentian. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana pengaruh sumber daya manusia terhadap proses implementasi kebijakan penanganan sampah di Kabupaten Bulukumba. Apakah rekrutmen, pengembangan, dan pemberhentian sumber daya manusia menjadi pendukung atau penghambat. Sumber daya manusia yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah dari pihak dinas dan masyarakat.

5. Sumber Daya Lainnya berupa Teknologi

Atribut dalam sumber daya lainnya berupa teknologi meliputi ketersediaan infrastruktur dan ketetapan penggunaan teknologi. Teknologi dalam penelitian ini menjadi sarana tambahan dalam proses penanganan sampah di Kabupaten Bulukumba misal berupa teknologi alat pencacah dan mesin hidrolik. Penelitian ini akan menganalisis ada tidaknya dan bagaimana pengaruh penggunaan teknologi terhadap proses implementasi kebijakan penanganan sampah di Kabupaten Bulukumba. Kaitannya apakah menjadi pendukung atau penghambat dalam penanganan sampah di Kabupaten Bulukumba.

3.3 Manajemen Penanganan Sampah

Menurut Rohim (2020:20) penanganan sampah seharusnya tidak hanya berupa pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan sampah semata tetapi untuk skala rumah tangga dapat menerapkan upaya meminimalisir dengan cara mengurangi, memanfaatkan kembali dan mendaur ulang sampah yang dihasilkan. Adapun 4 (empat) prinsip yang dapat digunakan dalam upaya penanganan sampah, yaitu:

1. *Reduce* (mengurangi), prinsip ini dimaksudkan bahwa masyarakat bisa berupaya mengurangi produksi sampah. Misalnya membawa tas belanja saat ke pasar untuk mengurangi penggunaan plastik.
2. *Reuse* (mengggunakan kembali), prinsip ini dimaksudkan bahwa masyarakat bisa menggunakan barang yang berpeluang untuk digunakan kembali, sebagai upaya memperpanjang waktu pemakaian barang sebelum menjadi sampah. Misalnya menggunakan kembali botol plastik wadah air minum.
3. *Recycle* (mendaur ulang), prinsip ini dimaksudkan bahwa masyarakat bisa mendaur ulang Kembali barang yang ada sehingga tidak berakhir menjadi sampah. Misalnya mendaur ulang sampah organik menjadi kompos dan membuat pot bunga dari botol minuman soda.
4. *Replace* (mengganti), prinsip ini dimaksudkan bahwa masyarakat bisa mengganti penggunaan barang yang tidak ramah lingkungan. Misalnya mengganti penggunaan *styrofoam* dan kantong plastik.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

1. Faktor Pendukung

Berdasarkan 12 atribut dari teori yang digunakan peneliti, berikut yang menjadi faktor pendukung dalam implementasi kebijakan penanganan sampah di Kabupaten Bulukumba.

1. Pembentukan dan Penambahan Tugas Organisasi Baru

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bulukumba membentuk sebuah organisasi baru berupa Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam rangka membantu proses penanganan sampah di lapangan. Penanganan sampah secara langsung di tangani oleh pihak UPT sebagai organisasi yang dibentuk dinas. Setelah masyarakat membuang sampah, rangkaian penanganan sampah di ambil alih oleh pihak UPT. Pengumpulan sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPST dilakukan oleh para pengangkut sampah menggunakan motor sampah. Setelah itu pengangkutan sampah dilakukan oleh pengangkut yang menggunakan pick up atau truk armroll yang akan membawa sampah ke TPA. Pengolahan sampah di TPA dari sampah anorganik, pembuatan kompos, hingga gas metan dilakukan oleh pekerja TPA Boronganempa di bawah pengontrolan dan pengawasan pihak UPT.

2. Pembuatan SOP

SOP menjadi salah satu faktor pendukung dalam implementasi kebijakan penanganan sampah. Hal ini jelas karena pengelolaan sampah mulai dari bagaimana sampah di sumbernya bisa sampai ke TPA dan dikelola sangat membutuhkan pedoman dalam tiap prosesnya agar lebih efektif dan efisien. Selain itu, dengan adanya SOP pengelolaan sampah memudahkan para pekerja dalam mengerjakan dan menyelesaikan tugasnya masing-masing.

3. Ketersediaan dan ketetapan penggunaan infrastruktur teknologi

Di era yang semakin modern ini teknologi sangat diperlukan untuk mempermudah segala sesuatunya tidak terkecuali implementasi kebijakan. Mesin-mesin sebagai bentuk penggunaan teknologi yang sangat membantu para pekerja pengelolaan sampah di TPA.

2. Faktor Penghambat

Berdasarkan 12 atribut dari teori yang digunakan peneliti, berikut yang menjadi faktor penghambat dalam implementasi kebijakan penanganan sampah di Kabupaten Bulukumba.

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) yang bekerja sudah seharusnya diberikan peningkatan kualitas dalam bentuk pengembangan diri dan keterampilan. Keterbatasan anggaran yang berdampak ke minimnya ketersediaan fasilitas pengembangan dari dinas, di tambah dengan para pekerja di TPA khususnya dan petugas kebersihan yang kurang mendukung memperjelas bentuk hambatannya.

2. Pendapatan dan Belanja Anggaran

Pendapatan anggaran dalam pelaksanaan penanganan sampah di Kabupaten Bulukumba diperoleh melalui dana APBD, PAD, dan retribusi. Belanja anggaran digunakan untuk biaya operasional seperti sarana dan prasarana yang digunakan dalam penanganan sampah. Data jumlah anggaran yang digunakan untuk program pengelolaan sampah pada tahun 2022 di Kabupaten Bulukumba mengalami kekurangan. Ada penambahan dana sebanyak 1.600.000.000 dengan fokus di

pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah.

3. Rekrutmen Sumber Daya Manusia

Pekerja di bagian UPT pengelolaan kebersihan, pertamanan, dan persampahan masih didominasi 60% oleh PNS dengan latar belakang pendidikan formal di tingkat SMP. Berdasarkan data sekunder dan hasil wawancara tersebut bahwa rekrutmen sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penghambat dalam implementasi kebijakan penanganan sampah. Garis besarnya bahwa pihak dinas kesulitan merekrut anggota atau petugas dengan SDM berpendidikan baik atau tinggi untuk memudahkan dalam proses bekerja.

3. Upaya Mengoptimalkan Implementasi Kebijakan Penanganan Sampah

1. Pemberian edukasi dan pelatihan secara berkala kepada masyarakat dan kelompok petugas kebersihan di TPA. Petugas kebersihan di TPA penting diberikan pelatihan secara berkala agar pekerjaannya lebih maksimal dan sesuai SOP. Selain itu, edukasi dan pelatihan terkait mengolah sampah rumah tangga menjadi kompos dengan cara sederhana juga bisa diberikan kepada masyarakat seperti ibu rumah tangga.
2. Meningkatkan pemeliharaan sarana dan prasarana yang digunakan dalam penanganan sampah. Mulai dari kelengkapan pekerja seperti sarung tangan dan masker, perbaikan container pengangkut sampah, sampai ke perbaikan jalan menuju TPA dan di lingkungan dalam TPA sehingga proses pengangkutan sampah tidak terkendala.
3. Memaksimalkan anggaran biaya operasional dalam proses penanganan sampah. Anggaran adalah hal yang sangat penting dan berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi sebuah kebijakan.

3.5 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan faktor penghambat lainnya berkaitan dengan Dimensi cell landfill TPA Borongmanempa Bulukumba, bahwasanya cell landfill seluas 16.208 m² dengan kapasitas 577.512 m³ atau 190.579 ton dan diperkirakan dapat digunakan hanya kurang lebih 6 (enam) tahun, sementara saat ini TPA sudah beroperasi selama 6 tahun lebih dengan total volume sampah yang masuk ke TPA sudah di angka 109.540 ton. Dengan begini luas landfill yang bisa digunakan hanya sekitar 81.039 ton lagi, sehingga kondisinya menjadi darurat sampah.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan implementasi kebijakan penanganan sampah di Kabupaten Bulukumba masih belum optimal. Ditandai dengan faktor penghambat berupa pertama kesulitan rekrutmen bagi sumber daya manusia yang berkompeten dalam penanganan sampah. Dalam hal ini masih belum kondusifnya perspektif masyarakat terhadap pekerjaan sebagai pengelola sampah. Kedua, minimnya pengembangan Sumber Daya Manusia ditandai dengan kurang memadainya pelaksanaan pelatihan. Ketiga, belum maksimalnya sarana prasarana dalam penanganan sampah. Keempat, tidak tercukupinya anggaran pelaksana dalam menunjang keberhasilan proses implementasi kebijakan penanganan sampah.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan berupa waktu penelitian yang tergolong singkat. Singkatnya waktu penelitian menyebabkan peneliti kurang maksimal dalam melakukan observasi sehingga berdampak ke hasil kajian peneliti. **Arah Masa Depan Penulisan.** Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih awam dilakukan di lokus penelitian. Oleh karena itu, peneliti menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan implementasi kebijakan penanganan sampah di Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan sehingga memperoleh jawaban yang lebih maksimal dalam menjawab setiap rumusan masalah yang ada.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih ditujukan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bulukumba, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, LB3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kebersihan, Pertamanan, dan Persampahan, petugas TPA dan masyarakat yang telah memberikan izin dan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian serta seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung suksesnya pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design. (Fourth Edition). SAGE Publications*
- Creswell, J. W & Creswell, J. D. (2018). *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (Fifth Edit). SAGE Publications.*
- Dye, T. R. (2017). Understanding Public Policy. In *Understanding Public Policy* (fifteenth).
- Rohim, M. (2020). *Teknologi Tepat Guna Pengolahan Sampah. CV Penerbit Qiara Media*
- Wasistiono, S. (2013). *Pengantar Ekologi Pemerintahan. IPDN Press. Sumedang.*

JURNAL DAN SKRIPSI

- Ahdi, M. A. (2022). Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Benda Kota Tangerang. *Repository.Uinjkt.Ac.Id.* Nisa, S. Z., & Saputro, D. R. (2021). Pemanfaatan Bank Sampah sebagai upaya Peningkatan Pendapatan Masyarakat di Kelurahan Kebonmanis Cilacap. *Bantenese: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 89–103. <https://doi.org/10.30656/ps2pm.v3i2.3899>
- Nugroho. (2013). Hubungan Tingkat Pengetahuan Dan Sikap Dengan Perilaku Ibu PKK Dalam Pengelolaan Sampah Di Dusun Mengwitani Kecamatan Mengwitani Kabupaten Badung. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.

Rizqi, S. D. Al. (2019). Perilaku Masyarakat Dalam Mengelola Sampah Rumah Tangga di Desa Kemlagi Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto. *Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*, 115.

Yudianto, T., Setyono, P., & Handayani, I. G. A. K. R. (2021). Implementasi Kebijakan dan Strategi dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Blora. *Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia*, 20(1), 21–26. <https://doi.org/10.14710/jkli.20.1.21-26>

Zafira, A. D., Damanhuri, E., Studi, P., Lingkungan, T., & Bandung, I. T. (2020). *MINIMASI PENGANGKUTAN SAMPAH KE TPA (Studi Kasus : program TPS 3R Kabupaten Bandung , Provinsi Jawa Barat)*.25, 33–52.

SUMBER LAINNYA

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bulukumba. (2022). *Sarana Prasarana Penanganan Sampah*.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bulukumba. (2023a). *Ketersediaan dan Ketetapan Penggunaan Teknologi Penanganan Sampah Di TPA Borongmanempa*.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bulukumba. (2022). *Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah*.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bulukumba. (2023b). *Tugas dan Fungsi UPT Pengelola Kebersihan, Pertamanan, dan Persampahan*.

Sipsn.menlhk.go.id. (2022a). *10 Kabupaten/Kota Penghasil Timbulan Sampah Terbanyak Di Sulawesi Selatan*. SIPSN - Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional. In <https://Sipsn.Menlhk.Go.Id/> (hal. 3–7). <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/home/fasilitas/bsu>

Sipsn.menlhk.go.id. (2022b). *Data Timbulan Sampah Nasional*. SIPSN Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional. In <https://Sipsn.Menlhk.Go.Id/> (hal. 3–7). <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/home/fasilitas/bsu>

Sulselprov.go.id. (2022). *Profil Provinsi Sulawesi Selatan*. <https://sulselprov.go.id>